

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	27
C. TUJUAN PENELITIAN	30
D. KEGUNAAN PENELITIAN	31
E. KEASLIAN PENELITIAN	32
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	52
A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA	53

1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan	58
2. Jenis Peraturan Perundang-undangan	63
B. PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	70
1. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan	70
2. Sejarah Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Dunia	79
3. Sejarah Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	91
C. PERDA DAN PENGUJIAN PERDA SEBAGAI SUB SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA	129
1. Pengertian Perda	129
2. Kedudukan Perda	136
3. Materi Muatan Perda	145
BAB III LANDASAN TEORI	155
A. KONSTITUSIONALISME	156
B. SUPREMASI KONSTITUSI	170
1. Konsep Dasar Supremasi Konstitusi	170
2. Penegakan Supremasi Konstitusi	176
3. Supremasi Konstitusi di Indonesia	186
C. HIERARKI NORMA	194
1. Hierarki dan Validitas Norma	194

2. Konsekuensi Penganutan Hierarki Norma	202
3. Hierarki Norma dalam Sistem Peraturan Perundang- undangan Indonesia	206
D. MODEL-MODEL PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	215
1. Pemodelan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan	218
2. Model yang Berlaku di Indonesia	237
3. Pengujian Konstitusionalitas dan Legalitas	241
4. Kompetensi Kelembagaan Penguji Konstitusionalitas Per-aturan Perundang-undangan	270
5. Perluasan Kompetensi Kelembagaan Peradilan Konstitusi dengan Kewenangan <i>Constitutional Complaint (CC)</i>	275
BAB IV CARA PENELITIAN	283
A. JENIS PENELITIAN	283
B. SUMBER DATA PENELITIAN	284
C. CARA PENGUMPULAN DATA	292
D. TEKNIK ANALISIS/PENGOLAHAN DATA	294
E. KONSEP-KONSEP POKOK DAN BATASAN PENGERTIAN	299

1. Pengujian	299
2. Konstitusionalitas	300
3. Perda	301
F. KETERBATASAN PENELITIAN	304
G. SISTEMATIKA PENULISAN	305
BAB V KEKOSONGAN MEKANISME	307
PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS PERDA	
A. SISTEM PENGUJIAN PERDA	307
B. MASALAH KONSTITUSIONALITAS PERDA	321
1. Perda Diskriminatif	324
2. Motivasi Pembentukan Perda Diskriminatif	339
3. Dampak Perda Diskriminatif	342
C. ANALISA KONSTITUSIONALITAS PERDA	346
1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8E Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran	355
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran	372
3. Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	388

D.	PRAKTIK PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI MA	414
a.	Kondusifitas Ketentuan Normatif dalam Mewujudkan Keadilan	423
b.	Akuntabilitas Praktik Peradilan	427
c.	Tingkat Kepatuhan pada Asas-asas Peradilan	432
d.	Ketersediaan Ruang bagi Kontestasi Gagasan	443
BAB VI	PENGUATAN SUBSISTEM MEKANISME PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS PERDA DAN ALTERNATIF PENYIKAPANNYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA	449
A.	PENGUATAN MEKANISME PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS PERDA	451
1.	Model 1: Penyatuatapan Terbatas Pengujian Konstitusionalitas Perda di Mahkamah Konstitusi	457
2.	Model 2: Perluasan Kewenangan MA dalam Pengujian Konstitusionalitas Perda	469
3.	Model 3: Penyatuatapan Holistik Mekanisme Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi	482

B.	PELEMBAGAAN <i>CONSTITUTIONAL COMPLAINT</i>	532
	SEBAGAI ALTERNATIF PENYIKAPAN	
	INKONSTITUSIONALITAS PERDA	
C.	PERSPEKTIF PROGRESIF PENYIKAPAN	538
	INKONSTITUSIONALITAS PERDA	
BAB VII	PENUTUP	543
A.	KESIMPULAN	543
B.	SARAN	560
	DAFTAR PUSTAKA	563
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	593